



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brbih.depok@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor B.638/BRBIH/KP.120/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gleni Hasan Huwoyon
NIP : 198012062014061001
Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
Instansi : Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Dengan ini menerangkan bahwa: Pada Tahun 2025 belum menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), sehingga saya tidak memiliki kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Depok, 19 Mei 2026
Yang menerangkan,

Gleni Hasan Huwoyon
NIP. 198012062014061001

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : GLENI HASAN HUWOYON

NPWP : 979164043019000 / 3174070612800004

NITKU : 3174070612800004000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 11/02/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 31043206305257911141

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Tutup



Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:

(021) 1500200

informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : **BPE-**
BPE : **19306/CT/KPP.3002/2026**
Tanggal : 20 Februari 2026

NPWP : 3174070612800004

Nama : GLENI HASAN
Wajib : HUWOYON
Pajak

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun : 2025
Pajak

Masa : Januari - Desember 2025
Pajak

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal : 20 Februari 2026
Terima :
SPT



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMIN HIDAYAT
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 121558

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/9.075 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI , Rp. 1.850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/65 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.545.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.863.545.000

III. HUTANG Rp. 140.101.447

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.723.443.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUNGA LAILI MELIANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 272134

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 41.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SOLUNA SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
2. MOTOR, YAMAH MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X MANUAL Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.828.729

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 715.828.729

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 715.828.729

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ARIEF HIDAYAT
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 956913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	355.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/260 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.618.248
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	359.618.248
III. HUTANG	Rp.	53.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	306.118.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Yth. Sdr **NUSAIBAH AN NUURIAH**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: NUSAIBAH AN NUURIAH
Jabatan	: BENDAHARA PENGELUARAN - BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**